**Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

**terhadap Pembangunan Perekonomian Masyarakat**

**di Kota Padang Sidimpuan**

**Rizki Suhanry Rambe1, Anggina Siregar2, Imsar3**

1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

 rizki.suhandri@gmail.com, rizkyanggina16@gmail.com, imsar@uinsu.ac.id

***ABSTRACT***

*DPRD is a component of government in an area that has the responsibility to oversee the implementation procedures contained in regional regulations and also statutory regulations. The fundamental problems in planning for the economic development of a region occur due to an emphasis on the strategy for carrying out the development which then has to do with the regional culture through the utilization of local (regional) human resources, institutions and physique. Qualitative techniques were applied in this study. The researcher uses a qualitative descriptive approach in conducting research by describing and explaining events, phenomena and events as they really are. The aim is to find out how DPRD institutions carry out economic development in a Padang Sidimpuan city community. In carrying out economic development, it must be based on the capacity of the population to create maximum results by utilizing available resources, creating collaboration between government agencies and private institutions, and fighting for programs that will be carried out for development in the archipelago.*

***Keywords:******DPRD, Role, Economic Development***

**ABSTRAK**

DPRD adalah komponen pemerintahan yang ada di suatu daerah mempunyai tanggungjawan yang mengawasi tata cara pelaksanaan yang ada dalam peraturan daerah dan juga peraturan undang-undang. Persoalan mendasar yang ada di dalam perencanaan pembangunan perekonomian suatu daerah terjadi karena adanya penekanan di strategi menjalankan pembangunan itu yang kemudian memiliki kaitan dengan budaya daerahnya melalui pendayagunaan SDM, kelembagaan, dan fisik lokal (regional). Teknik kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pendekatan kualitatif deskriptif dalam melakukan penelitian dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan kejadian, suatu fenomena dan peristiwa sebagaimana adanya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana lembaga DPRD dalam melakukan pembangunan perekonomian di suatu masyarakat kota padang sidimpuan. Dalam melakukan pembangunan perekonomian harus berdasarkan dengan kemampuan kapasitas penduduk agar menciptakan hasil maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia, menciptakan kolaborasi antara lembaga pemerintahan dengan lembaga swasta, serta memperjuangkan program-program yang akan dilakukan untuk pembangunan di wilayah kepulauan.

**Kata Kunci :** **DPRD, Peran, Pembangunan Perekonomian**

**PENDAHULUAN**

DPRD adalah komponen pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pengawasan yang mengawasi tata cara pelaksanaan yang ada dalam peraturan daerah dan juga peraturan undang-undang. Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan internasional daerah dapat dilakukan dengan adanya kolaborasi antara kepdes (kelapa daerah) dan APBD dengan adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh kegiatan pembangunan itu sendiri.

Pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan di suatu daerah berdasarkan UU Pemda No. 32 Tahun 2004. Lembaga eksekutif pemerintahan daerah dan juga lembaga legislatif yaitu DPRD pada hakekatnya setara sebagai aspek pendamping penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintah yang membedakan mereka adalah tanggung jawab, fungsi, hak dan kewajiban mereka. Maka diperlukan hubungan yang bersifat saling membangun dari lembaga pemerintah daerah setempat dengan DPRD yang tujuannnya harus menjadi satu yaitu bermitra untuk kepentingan masyarakat setempat agar menjadi pemerintah daerah unggul dalam hal pembangunan di daerah tersebut atau disebut dengan (good local governance).

Pembangunan dari ekonomi daerah yaitu suatu tahapan yang dimana pemerintah daerah dan juga masyarakat dapat mengelola sumber daya yang telah ada dan juga membangun langkah dari kerjasama diantara pemerintah daerah dan juga swasta dalam rangka membuat lapangan kerja yang baru yang mendorong dari kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah. Perkembangan ekonomi meliputi metrik penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi mengukur jumlah kegiatan ekonomi yang menyediakan uang tambahan bagi masyarakat selama periode waktu tertentu.

Persoalan mendasar yang ada di dalam perencanaan pembangunan perekonomian suatu daerah terjadi karena adanya penekanan di strategi menjalankan pembangunan itu yang kemudian memiliki kaitan dengan budaya daerahnya melalui pendayagunaan SDM, kelembagaan, dan fisik lokal (regional). Sikap itu mendorong untuk mengupayakan upaya dalam proses pembangunan yang bersumber dari daerah guna dalam mambuat lapangan pekerjaan agar mampu meningkatkan kegiatan perekonomian.

Padangsidimpuan berjarak 432 kilometer dari Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota Padangsidimpuan memiliki akses lahan yang cukup luas dan strategis karena terletak di jalur jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Sumatera. Kota Padangsidimpuan terletak di jantung Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota Padangsidimpuan terbagi menjadi enam kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Padang sidimpuan sebelumnya ditetapkan kedalam kota administrasi yang berlandaskan suatu peraturan pemerintah dalam nomor 32 tahun 1982. Kota padang sidimpuan telah ditetapkan kedalam wilayah otonomi pada tanggal 21 juni 2001 yang berlandaskan pada undang-undang nomor 4 tahun 2001, dan juga merupakan hasil dari digabungkannya kecamatan padang sidimpuan utara. Kecamatan padang sidimpuan hutaimbaru, dan juga kecamatan padang sidimpuan tenggara yang dimana sebelumnya merupakan bagian dari Tapanuli selatan.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Sumatera Utara yaitu akselerasi ekspansi dari tahun 2016 ke 2019 dan kontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara periode 2016-2020. Provinsi Sumatera Utara hanya tumbuh sebesar 5,18 persen pada tahun 2016, sedangkan Kota Padangsidimpuan tumbuh sebesar 5,29 persen. Kalaupun tahun 2020 sudah turun, dengan Kota Padangsidimpuan sebesar -0,73 persen. Namun Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar -1,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Padangsidimpuan secara umum masih lebih kuat dibandingkan Sumatera Utara.

**TINJAUAN LITERATUR**

**Perwakilan**

1. Menurut teori sosiologi Dieker, lembaga perwakilan bukanlah struktur politik, melainkan struktur sosial (sosial). Pemilih akan memilih perwakilan yang benar-benar ahli dalam urusan negara dan yang benar-benar akan melindungi kepentingan pemilih.
2. Van Gierke dari Jerman dipuji karena mengembangkan teori organ. Menurut gagasan ini, negara adalah organisme dengan perangkat eksekutif, parlementer, dan rakyat, masing-masing dengan peran dan saling ketergantungannya sendiri. Setelah rakyat memilih lembaga perwakilannya, mereka tidak lagi harus mencampuri lembaga tersebut, dan bebas bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Keberadaan badan legislatif menjadi unit politik yang menarik untuk diteliti dalam setting Indonesia. Hal ini karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan dan dinamika politik yang menyertainya. Ini dimulai sebagai komisi sementara bernama KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebelum diubah menjadi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yang melewati berbagai fase politik. Hal ini menunjukkan bahwa legislatif di Indonesia merupakan komponen integral dari politik Indonesia, dan dapat berubah dalam hal hubungan kelembagaan, kelembagaan internal, fungsi yang dilakukan, dan cara memilih anggotanya.

**Pembangunan perekonomian**

Teori Pembangunan Oleh Teori Karl Marx

 Dalam bukunya Das Kapital, Karl Marx membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga tahap: feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Pertumbuhan komunitas ini akan sesuai dengan metode pengembangan. Masyarakat feodalisme mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Karl Marx menganggap tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi, menyiratkan bahwa karyawan tidak memiliki kekuatan negosiasi melawan bos kapitalis mereka. Penggunaan prinsip-prinsip dasar ini membuka pintu eksploitasi tenaga kerja yang besar. Akibatnya, akumulasi modal menjadi kunci pertumbuhan pendapatan di masa depan.

 Pertumbuhan ekonomi merupakan metrik penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki arti yang berbeda. Pembangunan ekonomi umumnya dicirikan sebagai pertumbuhan jangka panjang dalam pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara yang diikuti oleh struktur kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan PDB atau GNP, baik kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan penduduk, atau terjadi atau tidaknya perubahan struktur ekonomi.

**METODE PENELITIAN**

Teknik kualitatif diterapkan pada suatu penelitian tersebut. Adapun penelitian tersebut bagian dari penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menerangkan, ataupun meringkas berbagai bentuk kondisi, situasi, fenomena dan juga peristiwa yang sebenarnya (Sugiyono, 2010), mengartikan dalam pendekatan deskriptif, yaitu pada pendekatan itu seorang penulis telah memaparkan suatu data dan juga bahan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan pada kantor DPRD padang sidimpuan dalam jangka waktu satu bulan dan juga berbagai bentuk dari jurnal dalam google sarjana yang berkaitan pada peran DPRD terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan. Lokasi penelitian padang sidimpuan, digunakan untuk pegumpulan data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Peran DPRD**

Pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan di suatu daerah berdasarkan UU Pemda No. 32 Tahun 2004. Lembaga eksekutif pemerintahan daerah dan juga lembaga legislatif yaitu DPRD pada hakekatnya setara sebagai aspek pendamping penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintah yang membedakan mereka adalah tanggung jawab, fungsi, hak dan kewajiban mereka. Dalam UU pasal 41 No.31 Tahun 2004 mengatakan bahwa fungsi DPRD adalah sebagai legislasi, anggaran, serta pengawasan. Pembahasan tentang fungsi pengawasan menjadi banyak sudut pandang karena anggota DPRD merupakan lembaga dari pemda dan juga merangkap sebagai pengawas kegiatan pemerintah daerah juga.

 Peran DPRD ketika melakukan kegiatan di suatu daerah tidak terlalu banyak, karena kebijakan yang ada di daerah tersebut dipegang oleh pimpinan yang ada di daerah itu. Jika dilihat dari pengertian ini maka diambil kesimpulan bahwa anggota DPRD ketika melaksanakan kegiatan disuatu daerah hanya sebagai pelengkap. Anggota DPRD memiliki peran sebagai pengawasan, yang menjadi persoalan yaitu bagaimana penerapan yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut, apakah sudah efetif dam efisien. Karena yang sudah diketahui bahwa DPRD pasti sulit dalam menjalankan tugasnya, karena kebujakan yang ada di suatu daerah tidak melalui kebijakan DPRD.

 Dewan perwakilan rakyat daerah atau disebut dengan DPRD yaitu sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan kedalam unsur terhadap pelaksana pemerintah daerah yang memiliki peran dan juga sebuah tanggung jawab untuk menciptakan efesiensi, efektivitas produktivitas dan juga akuntabilitas bagi pelaksanaan dari pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, weweang dan juga fubgsi dewan perwakilan rakyat daerah yang sesuai dalam ketentuan dari peraturan perundangan yang ditetapkan. Berikut merupakan kewajiban DPRD, yaitu :

1. Bekerjasana dengan bupati dalam menyusun peraturan daerah
2. Melakukan pemeriksaan terhadap rancangan yang diberikan bupati untuk anggaran belanja suatu daerah
3. Melakukan pengawasan dari kegiatan yang dilakukan oleh pemda dan APBD
4. Memberikan usulan mengenai mengangkat, memecat, menghanti bupati dan wakilnya.
5. Menetapkan PLT untuk bupati ketika jabatan bupati sedang kosong.
6. Menyampaikan pendapat serta mempertimbangkan usulan pemda untuk melakukan kegiatan perjanjian secara internasional suatu daerah
7. Mengambil kebijakan ketika ingin melakukan kerjasama secara internasional oleh pemda
8. Meminta laporan pertanggungjawaban dari masa jabatan bupati suatu daerah
9. Menetapkan kebijakan atas persetujuan ketika ingin melakukan kerjasana dengan pihak daerah yang lain atau dengan pihak ketiga ketika adanya hal yang membebani penduduk
10. Mengusahaan semaksimal mungkin agar melaksanakan tugas yang sesuai dengan undang-undang
11. Menjalankan tugas dan fungsi yang lain apabila tercantum dalam kebijakan undang-undang

**Peran DPRD terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kota Padang Sidimpuan**

Dengan adanya program pertumbuhan perekonomian akan menjadi salah satu alat pengukuran yang bisa dilakukan dalam terus memperluas kegiatan pembangunan yang ada di daerah setempat. Pembangunan tersebut dapat dijalankan dengan beberapa cara melalui kegiatan ekonomi yang akan membantu dalam meningkatkan dan merubah tingkat perekonomian suatu daerah. (Sirojuzilam, Mahalli,2010) berpendapat bahwa suatu gambaran yang didapat dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah untuk melakukan kegiatan ekonomi disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan perkembangan tingkat perekonomian yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai sinyal atas pertumbungan ekonomi yang ada.

 Adapun target dari pembangunan perekonomian sangat diutamakan suatu landasan berdasarkan pada standar yang ada pada wilayah dengan menerapkan pemanfaatan bagi sumber daya yang telah ada. Hal yang menjadi penetapan atas sektor bagi perekonomian yang berpotensial menjadikan suatu kebutuhan terhadap optimalisasi dari suatu proses dan juga suatu keberhasilan terhadap pembangunan ekonomi yang dimaksud. Langkah bagi upaya pada pembangunan ekonomi daerah memiliki target utama supaya bisa memperoleh peningkatan kualitas, kuantitas, dan lapangan pekerjaan penduduk setempat.

 Hal yang dilakukan agar mewujudkan tercapainya kebijakan yang disepakati maka lembaga pemerintah dengan penduduk daerah setempat harus memiliki hubungan kekeluargaan yang baik, serta saling memberikan dukungan dan inovasi demi pembangunan. Karena dalam melakukan pembangunan perekonomian harus berdasarkan dengan kemampuan kapasitas penduduk agar menciptakan hasil maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia. Jika pembangunan ekonomi dilakukan tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu akan dikhawatirkan program yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan akan memicu terjadinya penghambatan program pelaksanaan.

 Pembangunan perekonomian di suatu daerah merupakan suatu proses yang dimana pada pemerintah daerah dan juga penduduk dalam mengelola suatu sumber daya yang tersedia dan menciptakan kolaborasi antara lembaga pemerintahan dengan lembaga swasta, tujuan hal ini dilakukan adalah untuk membuat lapangan pekerjaan melalui pembangunan yang akan dijalankan. Perkembangan ekonomi menunjukkan telah sampai sejauh mana aktifitas bagi perekenomonian yang bisa menghasilkan pendapat tambahan terhadap masyarakat bagi periode tertentu. Diantara indikator yang ada untuk menunjukkan ketingkatan bagi kejayaan suatu daerah yaitu dalam data yang berasal dari produk domistik diatas dasarin dari penetapan harga yang telah ada maupun berdasarkan harga yang belum ada. Penduduk yang dianggap mendapati perkembangan perkembangan pada kesejahteraan bagi penduduk jika memiliki pendapatan lebih besar dari pendapatan yang sebelumnya dan akan terus meningkat. Perkengangan ekonomi menjadi suatu landasan sinyal bagi ketiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk setempat, daripada itu bisa dilakukan sebagai sudut pandang dari meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut.

 Fungsi lain yang telah didapatkan terhadap DPRD merupakan fungsi anggaran, maka anggota dewan diharapkan mampu memperjuangkan program-program yang akan dilakukan untuk pembangunan di wilayah kepulauan. Suatu rencana dalam menjalankan pembangunan perekonomian diartikan dalam bentuk pemberian hibah yang akan disalurkan kepada para petani, nelayan, karang taruna yang akan dijadikan sebagai bantuan dari perangkat pemerintahan daerah dan juga dinas dari kantor pusat. Adapun program yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada digunakan untuk membuatan jalan, listrik, juga melipusi sarana transportasi seperti angkutan dan hal lainnya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat di kota Padang Sidimpuan, adapun beberapa peran yang dilakukan DPRD, yaitu :

1. Antara lembaga pemerintah dengan penduduk daerah setempat harus memiliki hubungan kekeluargaan yang baik, serta saling memberikan dukungan dan inovasi demi pembangunan. Karena dalam melakukan pembangunan perekonomian harus berdasarkan dengan kemampuan kapasitas penduduk agar menciptakan hasil maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia
2. Menciptakan kolaborasi antara lembaga pemerintahan dengan lembaga swasta, tujuan hal ini dilakukan adalah untuk membuat lapangan pekerjaan melalui pembangunan yang akan dijalankan.
3. Memperjuangkan program-program yang akan dilakukan untuk pembangunan di wilayah kepulauan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan.* Universitas BrawijayaPress.

Chaharani, N. A., & Nurjaman, A. (2022). *Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ): Pembelajaran dari Kota Malang Implementation of Development Supervision by the Regional People ’ s Representative Council ( DPRD ): Lessons Learned From the City of Malang*. *21*(01), 59–69. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287

Hidayaturrahman, M. (2020). *Peran wakil rakyat dalam pembangunan di daerah pemilihan Sumenep*. Jurnal Sosial Politik, 6(1), 128-141.

Mandey, M. (2016). *IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DALAM RANGKA “GOOD GOVERNANCE*. *IV*(2), 178–188.

Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2021). PERANAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH. *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION*, *6*(2), 108–116.

Pohan, A., & Yafiz, M. (2022). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, *2*(1), 790–794.

Santoso, M. A. (2011). *Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18(4), 604-620.

Siwu, H. F. D. (2019). *Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).

Wijaya, I. R., & Yafiz, M. (2022). Sinergi Pemerintah DPRD dan Masyarakat dalam Perekonomian. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *1*(2), 47–50. https://doi.org/10.37676/mude.v1i2.2103